

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pusat Kerja Sama Luar Negeri merupakan unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Secara keseluruhan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki 5 (lima) Biro dan 3 (tiga) Pusat. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan fungsi manajemen pendukung dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Pusat Kerja Sama Luar Negeri melaksanakan fungsi manajemen mendukung pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian, khususnya pada aspek manajemen kerja sama luar negeri di bidang pertanian.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan berbagai perubahan mendasar terkait pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah (*Medium-Term Expenditure Framework*), penganggaran terpadu (*Unified Budget*), dan penganggaran berdasarkan kinerja (*Performance Budget*).

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2), menetapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan

sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Di samping itu, Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Diktum Kedua menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Fungsi Renstra K/L sangat penting karena merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun) yang meliputi Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Renja K/L dan RKA-KL ini merupakan lampiran Nota Keuangan untuk mengantarkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disampaikan oleh Presiden RI dalam pidato Kenegaraan di depan DPR-RI pada tanggal 16 Agustus setiap tahunnya.

Sebagai turunan dari Renstra K/L, maka Renstra Pusat Kerja Sama Luar Negeri (pada tingkat Eselon II) juga memiliki peran dan fungsi yang tak kalah penting. Dengan demikian, Renstra Pusat Kerja Sama Luar Negeri 2014-2019 ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja, RKA-KL, dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat Kerja Sama Luar Negeri setiap tahunnya selama periode tahun 2014-2019.

1.2. Struktur Organisasi Pusat Kerja Sama Luar Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Kerjasama Luar

Negeri merupakan satu unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerjasama luar negeri di bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama bilateral di bidang pertanian.
2. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama regional di bidang pertanian.
3. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama multilateral di bidang pertanian.
4. Pelaksanaan urusan atase pertanian.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerja sama Luar Negeri.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Susunan organisasi Pusat Kerja Sama Luar Negeri terdiri dari:

1. Bidang Bilateral
2. Bidang Regional
3. Bidang Multilateral
4. Sub Bagian Tata Usaha dan Atase Pertanian

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Kerja Sama Luar Negeri



Sumber :
Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

1.3 Tugas, Pokok Dan Fungsi Pusat Kerja Sama Luar Negeri

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010, Pusat Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian.

A. Bidang Bilateral

Bidang Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, Afrika dan Pasifik.

Bidang Bilateral memiliki 3 sub bidang, yaitu:

1. Sub bidang Asia dan Pasifik.
2. Sub bidang Amerika dan Eropa.
3. Sub bidang Afrika dan Timur Tengah.

Bidang Bilateral menyelenggarakan Tugas :

1. Subbidang Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan Negara negara di kawasan Asia dan Pasifik.
2. Subbidang Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan Negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa
3. Subbidang Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar

negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

B. Bidang Regional

Bidang Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian dengan lembaga regional ASEAN, Non ASEAN dan Intra Kawasan.

Bidang Regional memiliki 3 sub bidang, yaitu:

1. Sub bidang ASEAN.
2. Sub bidang Non ASEAN
3. Sub bidang Intra Kawasan.

Bidang Regional menyelenggarakan Tugas :

1. Subbidang ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara regional dengan lembaga ASEAN.
2. Subbidang Non ASEAN mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara regional dengan lembaga non ASEAN.
3. Subbidang Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara regional dengan lembaga Intra Kawasan.

C. Bidang Multilateral

Bidang Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara multilateral dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Bidang Multilateral memiliki 3 sub bidang, yaitu:

1. Sub bidang Perserikatan Bangsa Bangsa.
2. Sub bidang Organisasi Internasional Pemerintah dan Non Pemerintah.
3. Sub bidang Administrasi Perencanaan.

Bidang Multilateral menyelenggarakan Tugas :

1. Subbidang Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang Pangan dan Pertanian.
2. Subbidang Organisasi Internasional Pemerintah dan Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program kerja sama luar negeri , serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara Multilateral dengan Organisasi Internasional pemerintah dan non pemerintah.
3. Subbidang Administrasi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, evaluasi,dan

pelaporan serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian.

D. Sub Bagian Tata Usaha dan Atase Pertanian

Subbagian Tata Usaha dan Atase Pertanian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat-menyurat dan kearsipan Pusat Kerja Sama Luar Negeri, serta Atase Pertanian.

1.4. Capaian Kinerja Pusat Kerja Sama Luar Negeri

Sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2010 – 2014 maka telah ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

- Tahun 2010 dengan 6 indikator kinerja
- Tahun 2011 dengan 6 (enam) indikator kinerja
- Tahun 2012 dengan 5 (lima) indikator kinerja
- Tahun 2013 dengan 5 (lima) indikator kinerja
- Tahun 2014 ada 4 (empat) indikator kinerja.

Sasaran strategis tersebut adalah meningkatnya kualitas dokumen nota kesepakatan, pembinaan penyelenggaraan kerja sama luar negeri, dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, layanan perkantoran, dokumen pembinaan/penyelenggaraan kerja sama di atase pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma serta komputer dan peralatannya. Pencapaian sasaran strategis tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik, dimana hal tersebut tercermin dari target dokumen dan laporan yang semuanya telah terealisasi 100 %.

Tabel 1. Penetapan Kinerja (PK) Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2010 - 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Jumlah dokumen					Total		Capaian (%)
			2010	2011	2012	2013	2014	Tar get	Reali sasi	
Meningkatnya intensitas dan kualitas kerja sama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral	1	Jumlah dokumen Nota Kesepakatan kerja sama pertanian dalam kerangka bilateral, rional dan multilateral, serta PBB untuk pangan dan pertanian (laporan)		4	12	13	10	39		100
		Realisasi		4	12	13	10	39	39	
	2	Jumlah laporan kegiatan dan pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama internasional		3	1	3	2		9	100
		Realisasi		3	1	3	2	9	9	
	3	Dokumen Perencanaan dan pengelolaan anggaran		1	1	1	1	4	4	100
		Realisasi		1	1	1	1	4	4	
	4	Layanan Perkantoran (bulan layanan)		12	12	12				100
		Realisasi		12	12	12	12	48	48	
	5	Jumlah dokumen pembinaan /penyelenggaraan kerjasama di atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma.	4		4	4	4	12	12	100
		Realisasi	4		4	4	4	12	12	
	6	Komputer dan peralatannya	4	15						100
		Realisasi	4	15				15	15	

1.4.1. Capaian Kinerja Bidang Bilateral

Kerja sama dalam kerangka bilateral selama periode tahun 2010-2014 telah dilakukan dengan negara-negara di Kawasan Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa serta Afrika dan Timur Tengah. Negara-negara yang cukup intens menjalin kerja sama bidang pertanian dengan Indonesia antara lain: Korea Selatan, Australia, New Zealand, Malaysia, Thailand, Jepang, China, Rusia, Belanda, Argentina, Peru, Brazil, Kolombia, Amerika

Serikat, Canada, Meksiko, Jerman, Afrika Selatan, Sudan, Madagaskar, Timor Leste, Namibia, Tanzania dan lain-lain.

Selama periode tahun 2010-2014, beberapa Menteri Pertanian dan Duta Besar negara sahabat telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian RI. Pertemuan tersebut dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri saat Menteri Pertanian melakukan kunjungan ke luar negeri.

Kerja sama bilateral bidang pertanian telah dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain : kerja sama investasi pertanian, *capacity building*, promosi produk-produk pertanian, penelitian dan pengembangan pertanian dan sebagainya. Secara umum kerja sama Bilateral pada periode 2010 – 2014 telah menghasilkan beberapa tindak lanjut dari sejumlah nota kesepahaman (MoU, Agreement, ROD, MoM, dll) dengan Negara Mitra, namun demikian masih terdapat beberapa kesepakatan yang belum dapat direalisasikan ke dalam sebuah *action plan* atau kegiatan.

Pada tahun 2013, Indonesia telah merealisasikan pemberian bantuan teknis di bidang *capacity building* dan melalui pemberian alat mesin pertanian ke sejumlah negara mitra diantaranya: Fiji, Vanuatu, Senegal, Gambia, Tanzania, Mozambik, Zimbabwe, Kenya, Ethiopia. Indonesia juga berperan dalam meningkatkan produktifitas pangan di Sudan dan Madagaskar melalui *pilot project* pengembangan demplot padi di Sudan dan kedelai di Madagaskar.

1.4.2. Capaian Kinerja Bidang Regional

Kerja sama Regional meliputi kerja sama dengan lembaga internasional di kawasan regional seperti: ASEAN, Non ASEAN, dan Intra Kawasan. Selama periode 2010-2014, beberapa capaian kerja sama ASEAN di sektor bidang pangan adalah:

- *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)*
- *ASEAN Animal Health Trust Fund (AAHTF)*
- *MOU ASEAN-China on Food and Agriculture Cooperation*
- *MOU on ASEAN Co-Operation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme*
- *MOU ASEAN-China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation*
- *MOU ASEAN-FAO on Strengthening Cooperation in Agriculture and Forestry*
- *MOU ASEAN-OIE*
- *MOU on ASEAN Cooperation and Joint Approaches in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme (2015-2019)*
- *MOU ASEAN-People's Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation.*

Pertemuan Tingkat Menteri APEC tahun 2014 di Beijing menghasilkan *Beijing Declaration on APEC Food Security* yang menekankan pada perlunya peningkatan produktivitas pertanian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, pengelolaan paska panen untuk mengurangi kehilangan makanan, dan penguatan kerja sama regional dalam promosi ketahanan pangan.

Seiring dengan meningkatnya posisi Indonesia sebagai *Middle Income Country (MIC)*, Kementerian Pertanian secara konsisten ikut dalam mendukung program Kerja Sama Selatan Selatan (KSS). Peran Kementerian Pertanian utamanya adalah memberikan bantuan teknis terkait sektor pertanian, diantaranya:

- 1) Menyelenggarakan pelatihan yang telah diikuti oleh peserta dari negara di kawasan Asia, Pasifik, Afrika
- 2) Memenuhi komitmen pemberian alsintan (traktor tangan, pompa air, *power tresher* dan *rice milling unit*) ke Fiji, Vanuatu, Tanzania Sudan, Gambia, Tonga, Samoa, Laos, Papua Nugini, Myanmar, Kamboja dan Etiopia
- 3) Pengiriman tenaga ahli bidang pertanian ke Fiji, Vanuatu, Tanzania, Sudan, Suriname dan Madagaskar.

Pada tahun 2014, Pusat KLN telah melaksanakan Studi Banding dalam rangka mendukung program kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia ke Tsukuba dan Tokyo Jepang serta menyelenggarakan pelatihan bahasa Inggris bagi petugas teknis KSST di Surabaya.

Kerja sama sektor pertanian dan ketahanan pangan diwadahi forum D-8 *Agricultural Ministerial Meeting on Food Security*, yang telah menghasilkan inisiatif kerjasama ketahanan pangan melalui lima area yaitu: produksi pupuk, produksi pakan ternak, penyediaan benih berkualitas dengan keterlibatan swasta dan pemerintah. Beberapa capaian utama kerjasama ketahanan pangan D-8, antara lain adalah:

- 1) Diluncurkannya D8 AFIC (Animal Feed Information Center)
- 2) Kesepakatan penelitian pengembangan alternatif bahan pakan ternak yaitu PKC, *rice brand* dan cassava
- 3) Kesepakatan untuk mewujudkan *three level seed bank* di wilayah D-8 (WG on Seed Bank).

Dalam Kerja Sama Ekonomi Sub Regional *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA) dan *Indonesia-Malaysia-Thailand* (IMT-GT), capaian utamanya adalah:

- 1) Implementasi *Blueprint* BIMP-EAGA 2012-2016
- 2) Implementasi *Blueprint* IMT-GT 2012-2016.

Pada tahun 2014, Indonesia menjadi Tuan rumah Pertemuan *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Working Group on Agriculture, Agrobased Industry, and Environment* (IMT-GT WGAAE) ke-7 yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Maret 2014 di Palembang.

1.4.3. Capaian Kinerja Bidang Multilateral

Pada Konferensi FAO ke-37 tahun 2011, Indonesia menyampaikan calon kandidat Direktur Jenderal FAO untuk periode 2012-2015 yaitu Prof. Dr. Indroyono Soesilo. Melalui proses voting akhirnya terpilih sebagai Dirjen FAO kandidat dari Brazil yaitu Dr. Jose Graziano da Silva. Dalam kunjungan resmi pertamanya ke Indonesia pada tanggal 26-28 Mei 2013, Dirjen FAO melakukan *courtesy call* kepada Wakil Presiden RI dan Pertemuan Bilateral dengan Menteri Pertanian.

Pada Konferensi FAO ke-38 tahun 2013, Pemerintah RI menerima penghargaan "*Notable Result*" sebagai negara yang telah berhasil

mencapai target penurunan angka kelaparan dan kemiskinan lebih dari 50% sesuai target pertama MDGs dan target *World Food Summit* (WFS), tiga tahun lebih awal dari tahun 2015.

Di Indonesia, pelaksanaan *World Food Day* (Hari Pangan Sedunia) secara nasional mulai diperingati sejak tahun 1981 dan pada tahun 2014 telah dilaksanakan Peringatan Hari Pangan Sedunia pada tanggal 6 Nopember 2014 dilaksanakan di Makasar, Sulawesi Selatan. Salah satu kegiatan HPS adalah *Diplomatic Tour* yang bertujuan memperkenalkan potensi tuan rumah/penyelenggara khususnya dalam bidang pertanian, kehutanan, serta perikanan.

Kementerian Pertanian berperan aktif pada berbagai forum internasional diantaranya: UN Bodies Forum (FAO, WFP, IFAD, UNFCCC, UNEP), WTO, G20, OECD, GRA, GEF, dan WEF. Selain itu juga aktif dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan terkait peningkatan kemitraan antara publik dan swasta (*Public-Private Partnership*/PPP) melalui forum PISAgro (WEF) dan berbagai inisiatif PPP dalam proyek IFAD. Pusat KLN mendokumentasikan kerja sama G-20, OECD dan WEF serta hasil pelaksanaan Sidang-sidang IFAD.

Kementerian Pertanian juga berperan aktif dengan membayar kontribusi dan memanfaatkan kerja sama pada 13 Organisasi Internasional Pemerintah, yaitu: APHCA, APPPC, CIMMYT, FAO, ICCO, IPPC, IRRI, ISO, ISTA, ITPGRFA, OIE, UNCAPSA, UNCSAM. Setiap tahun, Pusat KLN juga melakukan pemutakhiran Buku Keanggotaan Kementerian Pertanian pada Organisasi Internasional.

Pada tahun 2014, Kementerian Pertanian menandatangani perpanjangan MoU kerja sama dengan *Mercy-USA for Aid and Development, Inc* untuk periode 2014 – 2017.

World Food Programme (WFP) didanai secara sukarela (*voluntarily funded*). Untuk periode 2012 – 2015 Indonesia akan memberikan "*cost sharing*" sebesar USD 2,8 juta dengan fokus di tiga pilar sebagai berikut:

- a) Memperkuat kapasitas Pemerintah RI dalam menangani permasalahan seputar kerentanan pangan dengan peningkatan kegiatan monitoring, analisis dan pemetaan
- b) Memperkuat kapasitas Pemerintah RI dalam menyiapkan diri menghadapi kemungkinan adanya bencana alam dan operasi tanggap darurat
- c) Memperkuat kapasitas Pemerintah RI dalam mengurangi tingkat kurang gizi di bawah titik kritis.

Pusat KLN juga menjadi pengelola untuk kegiatan kajian yang mendapatkan pendanaan hibah dari IFAD. Kajian-kajian yang merupakan *best practices* dan *lesson learned* dari berbagai proyek berbantuan IFAD merupakan sub komponen *policy analysis* program READ.

Pusat KLN bersama Tim Perubahan Iklim berupaya mengembangkan kerja sama dalam kegiatan penanganan dampak perubahan iklim melalui berbagai forum internasional sebagai pelaksanaan RAN/RAD GRK sesuai Perpres No. 61 dan Perpres No. 71 tahun 2011.

Pada tahun 2012, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Pedoman No. 74/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Kementerian Pertanian. Pusat Kerja Sama Luar Negeri melakukan Sosialisasi PHLN dan memfasilitasi administrasi PHLN untuk Lingkup Eselon I Kementerian Pertanian serta pada tahun 2013 telah membentuk Sekretariat PHLN. Selain itu, Pusat KLN juga telah menyusun Profil Kerja Sama Kementerian Pertanian dengan beberapa lembaga donor, seperti: World Bank, ADB, IDB, IFAD, FAO, JICA, KOICA, ACIAR, IRRI, AVRDC dan AFACI.

**Gambar 2. Grafik Proyek PHLN Kementerian Pertanian
Tahun 2010 - 2014**



Berdasarkan data triwulan III tahun 2014, saat ini Kementerian Pertanian mengelola 4 buah proyek Pinjaman Luar Negeri senilai USD 164.960.000, sedangkan Hibah Luar Negeri sebanyak 63 judul proyek senilai USD 14.812.893. Dibandingkan dengan data pada tahun 2010, Kementerian Pertanian mengelola 6 buah proyek Pinjaman Luar Negeri senilai USD 143.860.000 dengan 84 buah Hibah Luar Negeri senilai USD 103.429.000.

1.4.4. Capaian Kinerja Sub Bidang Tata Usaha dan Atase Pertanian

Keluaran sub bidang tata usaha dan atase pertanian, meliputi :

- 1) Penyelenggaraan pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan perkantoran
- 2) Penyelenggaraan administrasi kegiatan dan kepegawaian
- 3) Laporan Evaluasi kegiatan
- 4) Laporan Mingguan, Bulanan, Triwulan, dan Tahunan
- 5) RENSTRA, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- 6) TOR, RAB dan RKA-KL
- 7) Pelayanan penyelenggaraan penerimaan kunjungan tamu asing dan badan internasional
- 8) Penyelenggaraan pengadaan alat perkantoran
- 9) Penyelenggaraan administrasi dan pencalonan pelatihan/pendidikan ke luar negeri
- 10) Penyelenggaraan administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
- 11) Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan untuk 4 Atase Pertanian (Brussel, Roma, Washington DC, dan Jepang).

1.5. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2014, jumlah SDM di Pusat Kerjasama Luar Negeri sebanyak 71 pegawai dengan rincian menurut pendidikan terakhir seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2: Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014

No	Unit Kerja	Doktor		Pasca Sarjana		Sarjana		Sarjana Muda		SMA		Jlh
		IV	III	IV	III	IV	III	III	II	III	II	
1	Kepala Pusat	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Bidang Bilateral	-	-	3	2	-	10	-	-	2	-	17
3	Bidang Regional	1	-	1	3	-	7	-	-	2	-	14
4	Bidang Multilateral	-	-	2	4	-	8	1	-	1	1	17
5	Sub Bag TU & Atani	-	-	2	2	-	14	1	-	3	-	22
	Jumlah	1	-	9	11	-	39	2	-	8		71

Bila dilihat dilihat dari jenis kelamin maka komposisi pegawai Pusat Kerja Sama Luar Negeri seperti terlihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3: Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jlh
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bidang Bilateral	12	6	18
2	Bidang Regional	5	9	14
3	Bidang Multilateral	6	11	17
4	Sub Bag TU & Atani	15	7	22
	Jumlah	39	31	71

BAB. II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi Kementerian Pertanian

Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2.2. Misi Kementerian Pertanian

1. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan mutu pangan yang beragam dan sehat.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
3. Meningkatkan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor produk pertanian.
4. Mewujudkan usaha pertanian terintegrasi untuk menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan.
5. Meningkatkan sistem usahatani berkelanjutan melalui adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya genetic.
6. Meningkatkan kapasitas sumberdaya pertanian untuk pengembangan kawasan pertanian bioindustri.
7. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.
8. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah

bidang pertanian yang amanah dan professional.

2.3. Tujuan Kementerian Pertanian

1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang berbasis sumberdaya local.
3. Menumbuhkembangkan diversifikasi pangan dan peningkatan gizi.
4. Meningkatkan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor produk pertanian.
5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

2.4. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Selama lima tahun ke depan (2015-2019), dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu empat sasaran strategis:

1. Peningkatan ketahanan pangan.
2. Peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor.
3. Penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Peningkatan kesejahteraan petani.

2.5. Visi Pusat Kerja Sama Luar Negeri

Menjadi institusi terdepan dalam melaksanakan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang sehat, berintegritas dan dinamis.

2.6. Misi Pusat Kerja Sama Luar Negeri

1. Meningkatkan mutu pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif
2. Menyusun rumusan kebijakan kerja sama luar negeri yang mendukung Strategi Induk pembangunan pertanian nasional
3. Menyusun program dan perencanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral.
4. Meningkatkan peran sebagai *leading* diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum Internasional.
5. Mendiseminasikan hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan.
6. Memantau dan mengevaluasi hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian.
7. Melaksanakan fungsi pelayanan organisasi yang prima.

2.7. Tujuan Pusat Kerja Sama Luar Negeri

Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan oleh Pusat Kerjasama Luar Negeri untuk periode tahun 2015 - 2019, sebagai berikut:

1. Untuk menunjang tugas pertanian dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian di dunia internasional serta untuk mendorong meningkatnya ekspor produk pertanian.
2. Untuk menunjang perjuangan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan dunia melalui forum bilateral, regional dan multilateral.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia pertanian baik petani ataupun birokrat dengan memanfaatkan peluang kerja sama dibidang

- pendidikan dan latihan dengan negara mitra baik dalam forum bilateral, regional maupun multilateral.
4. Meningkatkan kerjasama bidang pertanian melalui pertemuan / sidang-sidang untuk meningkatkan pembangunan pertanian yang secara luas dapat meningkatkan kesejahteraan para petani baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral.
 5. Menggali dan memanfaatkan peluang kerja sama melalui kerangka kerjasama bilateral, regional maupun multilateral untuk peningkatan kerja sama internasional bidang pertanian dalam rangka peningkatan kerja sama teknik maupun kerja sama perdagangan dan investasi sektor pertanian.
 6. Menunjang diplomasi politik melalui pertanian dalam rangka membela Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Menyediakan data dan analisis yang mendukung kegiatan peningkatan kerja sama luar negeri bidang pertanian, menyusun laporan kinerja dan menyiapkan bahan laporan pimpinan yang terkait dengan kerja sama luar negeri bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan audit laporan keuangan dan audit kinerja birokrasi.

2.8. Sasaran Pusat Kerja Sama Luar Negeri

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terciptanya mutu pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif .
2. Tersusunnya rumusan kebijakan kerja sama luar negeri yang mendukung *Strategi Induk* pembangunan pertanian.

3. Tersusunnya program dan perencanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerja sama bilateral, regional dan multilateral.
4. Terwujudnya peran sebagai *leading* diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum Internasional.
5. Terdiseminaskannya hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan.
6. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian.
7. Terlaksananya fungsi pelayanan organisasi yang prima.

BAB. III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 8 strategi Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan.
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian.
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit .
4. Penguatan kelembagaan petani.
5. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian.
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi.
7. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian.
8. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Kerja Sama Luar Negeri

Kebijakan Pusat Kerja Sama Luar Negeri diarahkan pada pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian dalam forum bilateral, regional, dan multilateral yang mendukung program pembangunan pertanian nasional secara terpadu dan terkoordinir antara instansi terkait pusat dan daerah.

Sedangkan strategi yang akan digunakan dalam sesuai arah kebijakan tersebut, adalah:

1. Pemantapan kerja sama kemitraan strategis dengan negara – negara mitra dan organisasi internasional untuk menunjang pembangunan pertanian nasional.
2. Peningkatan peran aktif diplomasi dan negosiasi Indonesia dalam berbagai pertemuan/ sidang dan pada organisasi internasional lainnya di bidang pertanian.
3. Peningkatan peran Indonesia pada forum ASEAN dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015.
4. Peningkatan citra positif Indonesia melalui kerja sama bidang pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
5. Peningkatan jejaring kerja Pusat dan daerah, negara mitra, dan perwakilan RI di luar negeri untuk mendukung kepentingan pembangunan pertanian nasional.
6. Pemantapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).
7. Peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Kerja Sama Luar Negeri.
8. Peningkatan pemanfaatan data dan informasi pertanian untuk mendukung pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian.
9. Peningkatan manajemen administrasi kerja sama luar negeri bidang pertanian.

3.3. Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas pada periode pembangunan sebelumnya, maka selama lima tahun ke depan (2015 – 2019) secara umum permasalahan yang dihadapi Pusat Kerja Sama Luar Negeri antara lain:

1. Kerja sama luar negeri belum memberikan kontribusi optimal dalam menunjang pelaksanaan pembangunan pertanian.
2. Penyebaran informasi kerja sama luar negeri belum optimal.
3. Perubahan lingkungan strategis internasional yang menandai keterbukaan perekonomian dan perdagangan global perlu disikapi dengan pengembangan kerja sama bilateral, regional dan multilateral yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan.
4. Kelembagaan pertanian (Atase Pertanian) di luar negeri belum berperan secara optimal.

Adapun potensi dan permasalahan yang diidentifikasi akan dialami oleh Pusat Kerja Sama Luar Negeri, antara lain:

1. Belum adanya Pedoman kerja sama luar negeri di bidang pertanian sebagai acuan dalam merencanakan dan melaksanakan kerja sama luar negeri.
2. Diplomasi internasional di sektor pertanian masih harus lebih diperkuat sehingga peluang kerja sama bidang Bilateral, Regional dan Multilateral dapat dimanfaatkan secara optimal.
3. Masih banyak kegiatan kerja sama luar negeri di lingkup Kementerian Pertanian yang tidak dilaporkan ke Pusat Kerjasama Luar Negeri baik dalam kerangka bilateral, regional, maupun multilateral.
4. Masih kurangnya koordinasi dalam penyusunan posisi Delegasi RI dalam suatu forum internasional. Selain itu, perlu adanya

- keepakatan posisi Delegasi terhadap suatu isu/topik tertentu misalnya ketahanan pangan, perubahan iklim, dan lain-lain sehingga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak terkait.
5. Perlu adanya pemetaan kebutuhan prioritas dalam memanfaatkan peluang kerja sama yang ditawarkan oleh negara mitra ataupun donor.
 6. Perlu dilakukan evaluasi baik terhadap rencana kerja sama maupun terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah dan sedang dilaksanakan terutama manfaat dan keefektifannya dalam menunjang pembangunan pertanian.
 7. Untuk realisasi investasi dari negara mitra masih banyak mengalami kendala terutama terkait dengan peraturan dan regulasi yang berlaku saat ini serta masih kurangnya kesiapan lokasi dan infrastruktur penunjang.
 8. Ada beberapa MOU yang masih pending karena kedua belah pihak belum ada kesepakatan, umumnya mengenai *Intellectual Property Rights* (IPR) dan *Genetic Resources Traditional and Knowledge* (GRTK).
 9. Perencanaan dan pelaksanaan suatu pertemuan terutama dalam forum bilateral sangat tergantung pada kesiapan kedua belah pihak sehingga perlu dilakukan komunikasi yang intensif untuk mencegah terjadinya penundaan pertemuan ataupun dana anggaran yang tidak terserap.
 10. Perlu adanya penguatan posisi tawar Indonesia dalam mendukung Kerja sama Selatan-Selatan baik dalam pengembangan kapasitas SDM Pertanian maupun pertukaran tenaga ahli dengan negara-negara mitra.

11. Pemanfaatan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Atase Pertanian Indonesia perlu dimaksimalkan dalam mendukung peluang dan promosi pengembangan produk pertanian serta mengkaji potensi, peluang kerja sama internasional di sektor pertanian.
12. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan terkait pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) harus tetap dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan-evaluasi proyek PHLN.
13. Masih terbatasnya jumlah SDM baik secara kuantitas maupun kualitas.
14. Administrasi penugasan pejabat/pegawai Pertanian ke luar negeri sering terhambat karena adanya pengusulan yang bersifat mendadak.